

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh religiusitas dan *machiavellian* terhadap kemungkinan terjadinya korupsi di sektor pemerintahan melalui studi pada Dinas se-Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai religiusitas yang dianut oleh seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan seseorang tersebut melakukan tindakan korupsi. Semakin tinggi nilai religiusitas yang dianut oleh seseorang akan menurunkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.
2. Sifat *machiavellian* yang ada di dalam diri seseorang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan seseorang melakukan tindakan korupsi. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya nilai etika yang berlaku di lingkungan kerja dan nilai-nilai religiusitas yang dimiliki seseorang, sehingga sifat *machiavellian* yang dimiliki tidak cukup mampu mendorongnya untuk melakukan tindakan korupsi.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, disadari bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sampel pada penelitian ini hanya terbatas pada Dinas se-Kabupaten Tanah Datar, sehingga tidak dapat mencerminkan keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Sumatera Barat.

2. Masih terdapat variabel lain yang dapat digunakan untuk pembaharuan penelitian yang memiliki kemungkinan memberikan pengaruh terhadap terjadinya korupsi di sektor pemerintahan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada badan yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan, atau menjadikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebagai sampel penelitian.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan tindakan korupsi, terutama di sektor pemerintahan.
3. Pemerintah sebagai lembaga terkait dapat memperhatikan religiusitas seseorang dalam proses seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara ataupun dapat menciptakan suasana kerja yang bernilai religiusitas tinggi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.